

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

DKI Diminta Tak Potong TKD Tenaga Kesehatan

Gambir, Warta Kota

Komisi A DPRD DKI meminta Pemprov DKI untuk tidak memangkas tunjangan kinerja daerah (TKD) tenaga kesehatan. Sebab peran mereka sangat penting dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Peran mereka sudah begitu besar dalam memerangi Covid-19 karena bersentuhan langsung dengan pasien yang terjangkit Covid-19," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono saat dikonfirmasi Sabtu (16/5). Mujiyono mengatakan, peniadaan pemotongan TKD tenaga medis merupakan wujud apresiasi pemerintah kepada mereka.

"DKI harus hitung ulang penyesuaian anggaran, agar tenaga medis ini tidak terdampak juga. Malah kebu-

tuhan mereka harus didukung penuh," ujar Mujiyono dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Rencananya, mulai bulan Mei Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memotong TKD bagi ASN sebesar 50 persen. Pemotongan TKD ASN ini dilakukan untuk penyesuaian kemampuan anggaran pemerintah daerah saat menghadapi pandemi Covid-19. Mujiyono juga meminta agar DKI membayarkan kembali TKD ASN yang dipotong itu pada saat ekonomi membaik nanti. TKD ASN yang dipotong ini mencapai Rp 408,73 miliar per bulan.

"Memang bagus untuk penghematan, tapi saya minta agar pemerintah mengganti lagi TKD yang telah dipotong itu pada saat ekonomi membaik, ta-



DKI harus hitung ulang penyesuaian anggaran, agar tenaga medis ini tidak terdampak juga.

Mujiyono
Ketua Komisi A
DPRD DKI Jakarta

hun depan," kata Mujiyono "Jangan sampai hak TKD mereka hangus. Kalau mau disesuaikan, sektor lain saja,

seperti anggaran formula E, pembebasan lahan dan lainnya," tambahnya

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir mengatakan, tunjangan ASN itu disesuaikan dengan kontraksi ekonomi yang terdampak Covid-19 yang mempengaruhi APBD DKI Jakarta. Menurutnya, pemotongan TKD direncanakan hingga 50 persen yang akan dimulai pada bulan Mei ini.

"Keputusannya sedang dirancang. Saat Pendapatan Daerah stabil, (Pembayaran TKD) akan kembali normal. Tapi semua tenaga medis dan paramedis yang menangani langsung Covid-19 itu dikecualikan. Kalau yang tidak menangani Covid-19, tetap dipangkas," ujar Chaidir. (faf)